REVIEW
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunianya Review Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Badan Perencananaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pasuruan.

Pasuruan, 01 November 2019
PIHAK PERTAMA

Ir. IHWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630203 198903 1 015

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Tugas dan Fungsi 5

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II RENCANA STRATEGIS **8**

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 8

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis 2018-2023 12

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019 ..... **16**

3.1. Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 16

3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Perenacanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 20

BAB IV PENUTUP **25**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **27**

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati Pasuruan dengan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2019 s/d 2023 11

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Periode Tahun 2019 s/d 2023 11

Tabel 2.3 Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 15

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 17

Tabel 3.2 Program dan Indikator Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023..... 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 6

DAFTAR LAMPIRAN

Hal.

Lampiran 1 Tujuan dan Sasaran Pembanguan Tahun 2019-2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.....

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan..... 32

Lampiran 3 Review Rencana Kinerja Tahunan Triwulan 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2019, maka disusun Review Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Review RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Review RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kegiatannya.

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih *(Clean Government),* dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 bagi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan kepada Bupati Kabupaten Pasuruan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
12. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Badan yang penyelenggaraannya dituangkan sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi.

1. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasuruan. BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

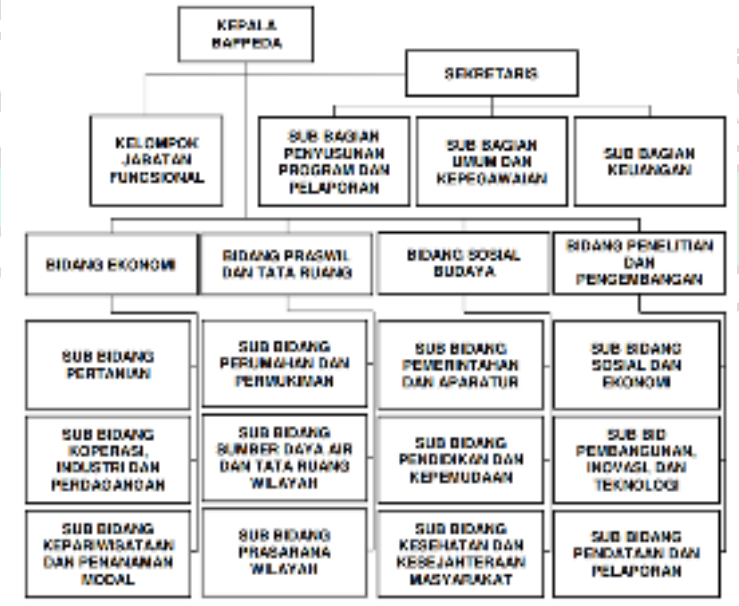
Berkaitan dengan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
f. pelaksan an fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasuruan



1.4. Sistematika Penulisan

Review Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan Reivew Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2019, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

2. **BAB II RENCANA STRATEGIS**

   Bab ini berisi tentang rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 berupa visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan umum.

3. **BAB III REVIEW RENCANA KINERJA TAHUN 2019**

   Bab ini berisi tentang rencana kinerja yang dilakukan selama 1 tahun yakni tahun 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

4. **BAB IV PENUTUP**

   Bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta kaidah pelaksanaan dan kesimpulan mengenai Review Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2019.

5. **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Merujuk pada **Misi ke 4** yaitu **Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi,** maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan ditentukan sebagai berikut :

1. Tujuan

   Berdasarkan misi nomer 4 Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

   a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan.

2. Sasaran

   Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai sasaran sebagai berikut :

   a. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.

   b. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah.

3. Indikator Sasaran

Dalam menetukan sasaran perlu adanya indikator sasaran antara lain:

a. **Sasaran pertama**

(Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik.

b. **Sasaran kedua**

(Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah) mempunyai indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

Adapun keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dari RPJMD dengan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BUPATI PASURUAN DENGAN PROGRAM KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
PERIODE TAHUN 2018 s/d 2023

BUPATI PASURUAN						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN				
VISI	**MISI**	**TUJUAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**TUJUAN**	**INDIKATOR**	**SASARAN**	**INDIKATOR**	**BIDANG**
MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT, DAN BERDAYA SAING	MEMPERKUAT DAN MEMPERLUAS REFORMASI BIROKRASI YANG MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF, BERSIH, EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN DEMOKRATIS YANG BERBASIS PADA TEKNOLOGI INFORMASI	4.1 : Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	4.1.1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	NILAI SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Perencanaan	1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.	1. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Bidang Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi, Bidang Prasarana Wilayah
								1. Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan beserta indikator kinerjanya Tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan

Tujuan (1)		Sasaran (2)		Indikator Kinerja (3)		Satuan (4)	Target Kinerja (5)				
							2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	Persen (%)	84%	88%	91%	95%	100%
		2.	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah	1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	Persen (%)	80%	85%	90%	95%	100%

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis 2018-2023

1. Strategi

Strategi diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan :

a) Terwujudnya perencaanaan daerah yang efektif

Sasaran :

a) Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan adalah :
   - Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola kepemerintahan yang inovatif dan berbasis pada good governance.

b) Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah adalah :
   - Peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.
   - Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
   - Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inovatif berbasis potensi dan sumberdaya lokal.
   - Peningkatan tatanan masyarakat yang partisipatif berbasis nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan.

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan Rencana Strategis sebagai panduan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran kepala daerah 5 tahun kedepan.

Berikut adalah tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan :

Tabel 2.3.
Tujuan, Sasaran, dan arah Kebijakan
Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Lebih Sejahtera dan Maslahat.
MISI 1. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif. **MISI 2**. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren. **MISI 3**. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. **MISI 4**. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. **MISI 5**. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, dan berkebudayaan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencaanaan daerah yang efektif	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola kepemerintahan yang inovatif dan berbasis pada good governance.	1. Memperbaiki kinerja birokrasi dan mematuhi regulasi guna mewujudkan prinsip-prinsip good governance. 2. Mengembangkan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi. 3. Menyusun dan mengembangkan SOP serta mengoptimalkan pemanfaatan IT. 4. Mengelola tata laksana pemerintah secara efektif dan efisien.
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah	Peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.	1. Meningkatkan partisipasi sekolah dan angka melek huruf. 2. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar. 3. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan formal. 4. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan dalam pondok pesantren. 5. Meningkatkan kuantitas perpustakaan dan minat baca masyarakat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. 2. Meningkatkan mutu kesehatan dasar. 3. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat. 4. Memperbaiki sistem jaminan kesehatan masyarakat.
		Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inovatif berbasis potensi dan sumberdaya lokal.	1. Menumbuh kembangkan pasar desa dan produk unggulan. 2. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM. 6. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif. 7. Memantapkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.
		Peningkatan tatanan masyarakat yang partisipatif berbasis nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan.	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban lingkungan. 2. Meningkatkan penegakan hukum dan kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah. 3. Meningkatkan forum komunikasi antar umat beragama. 4. Menumbuhkembangkan kebudayaan dan kearifan lokal serta pembangunan destinasi yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana.

BAB III

REVIEW
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019

3.1. Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

Review Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019.

Dalam upaya mendukung pencapaian misi dan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2019 telah ditentukan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019

Tujuan		Sasaran		Indikator		Target (%)
1.	Terwujudnya perencaanaan daerah yang efektif	1.	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1.	Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	84
		2.	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah	1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Program dan Indikator Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2018-2023

No. (1)	Program (2)	Indikator Program (3)	Target Kinerja Program Tahun Ke-				
			2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja	100%	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja	100%	-	-	-	-
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	-	-	-	-

6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Perangkat Daerah lingkup Bidang Ekonomi yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	89%	89%	89%	89%	100%
7	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang Sosial Budaya yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang baik	83%	86%	92%	97%	100%
8	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan sumber Daya Alam yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	71%	-	-	-	-
9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan	25%	25%	25%	25%	25%
10	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase kesesuaian proses Penyusunan Dokumen perencanaan sesuai ketentuan	71%	-	-	-	-

3.2. Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan mengusung 10 program dan 45 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.437.242.900,00,- seperti yang tertera dalam dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2019. Berikut ini Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2019 :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
   c. Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
   d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Penyediaan Makanan dan Minuman
   h. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
   i. Penyediaan Jasa Perkantoran
   j. Pengelolaan dan Managemen Arsip
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
   a. Pengadaan Peralatan Kantor
   b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
   c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   d. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor

e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
   b. Bimtek Perencanaan
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
   a. Penetapan RPJMD
   b. Penyusunan Rancangan RKPD
   c. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
   d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
   e. Koordinasi Perencanaan Pembangunan
   f. Penyusunan KUA-PPAS beserta dan KUA-P dan PPAS-P
   g. Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
   h. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
   i. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana
6. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
   a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian
   b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro
   c. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawasan Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek dan Kraton Kabupaten Pasuruan

d. Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kepariwisataanpenanaman modal dan ketenagakerjaan
e. Penyusuna Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kabupaten Pasuruan

7. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
   a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
   b. Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat
   c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
   d. Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
   e. Monitoring Evaluasi dan Pengedalian Bidang Sosial Budaya
   f. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur
8. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
   a. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kab. Pasuruan
   b. Koordinasi Peny. Kebijakan Pengembangan Praswil di Kab. Pas.
   c. Penyusunan Data Base Perencanaan Prasarana Wilayah
9. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
   a. Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
   b. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
   c. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan

10. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

a. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

b. Penyusunan SIG Peta Tematik dan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 ini merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas *output* yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019-2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pasuruan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Program	Indikator Program	Target Tahun					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
1.Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif; 2. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren; 3. Meningkatkan	1. Terwujudnya perencaanaan daerah yang efektif	1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	1.Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai dokumen perencanaan yang baik	84%	88%	91%	95%	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	
									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Program	Indikator Program	Target Tahun					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; 4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; 5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman,									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	-	-	-	-	
									PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase kesesuaian Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	-	-	-	-	
									PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian penyusunan Dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan	100 %	-	-	-	-	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Program	Indikator Program	Target Tahun					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
tenteram, religius, harmonis, dan berkebudayaan.									PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	89%	89%	89%	89%	100 %	
									PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai Dokumen perencanaan yang baik	83%	86%	92%	97%	100 %	
									PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Perangkat daerah lingkup Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	71%	-	-	-	-	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun (%)					Program	Indikator Program	Target Tahun					Ket
				2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023	
									PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase kesuaian proses penyusunan Dokumen perencanaan sesuai ketentuan	71%	-	-	-	-	
		Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan	25%	25%	25%	25%	25%	

Lampiran 2
Review
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2019

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator	Satuan	Target	Uraian	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Gaji Pegawai	**Gaji dan Tunjangan Pegawai**	**Persen (%)**	**100**	**Belanja Pegawai**	Terpenuhinya Gaji Tunjangan dan Pegawai	Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	100 %	Gaji Pegawai	**Input :** **1.** Dana DAU **Output :** **1.** Jumlah Gaji **Outcome :** **1.** Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	**Input :** Rp. 4.932.832.000 **Output :** 12 bulan **Outcome :** 12 bulan	
Terlaksanya Kegiatan Rutin	**Kegiatan rutin dan Laporan dapat diselesaikan tepat waktu**	**Persen (%)**	**100**	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 %	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**1. Output :** Jumlah rekening telepon dan internet yang terbayar **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur Internal	**1. Output :** 84 rekening - bulan **2. Masukan :** Rp. 87.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor	

			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. **Output :** Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kegiatan 2. **Masukan :** Jumlah Dana 3. **Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	1. **Output :** 312 Orang, bulan 2. **Masukan :** Rp. 312.145.000 3. **Hasil :** 70 Skor
			Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	1. **Output :** Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 2. **Masukan :** Jumlah Dana 3. **Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	1. **Output :** 20 Jenis 2. **Masukan :** Rp. 25.000.000 3. **Hasil :** 70 Skor
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. **Output :** Jenis Alat Tulis Kantor 2. **Masukan :** Jumlah Dana 3. **Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	1. **Output :** 46 Jenis, kali 2. **Masukan :** Rp. 102.350.000 3. **Hasil :** 70 Skor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. **Output :** Jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 2. **Masukan :** Jumlah Dana 3. **Hasil :** Tingkat Kepuasan	1. **Output :** 25 Jenis, kali 2. **Masukan :** Rp. 75.049.600 3. **Hasil :** 70 Skor

					Aparatur	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**1. Output :** Jumlah bahan bacaan **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 6 Jenis **2. Masukan :** Rp. 17.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor
				Penyediaan Makanan dan Minuman	**1. Output :** Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 4.236 Orang, kali **2. Masukan :** Rp. 184.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	**1. Output :** Jumlah perjalanan dinasluar daerah **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 60 Laporan **2. Masukan :** Rp. 808.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor
				Penyediaan Jasa Perkantoran	**1. Output :** Jumlah tenaga kontrak dan THL yang terbayar **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 96 Orang, bulan **2. Masukan :** Rp. 198.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor

KABUPATEN PASURUAN

							Pengelolaan dan Managemen Arsip	**1. Output :** Jumlah panjang arsip yang terkelola **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 100 Meter **2. Masukan :** Rp. 50.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	**1. Output :** Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 1 Paket **2. Masukan :** Rp. 52.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor
							Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	**1. Output :** Jumlah alat kantor yang terpelihara **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 83 Unit, kali **2. Masukan :** Rp. 106.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor
							Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**1. Output :** Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 35 Unit, kali **2. Masukan :** Rp. 432.000.000 **3. Hasil :** 70 Skor

					Pengadaan Peralatan Perkantoran	**1. Output :** Jenis Alat Kantor **2. Masukan :** Jumlah Dana **3. Hasil :** Tingkat Kepuasan Aparatur	**1. Output :** 22 Unit **2. Masukan :** Rp. 532.500.000 **3. Hasil :** 70 Skor
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Output : **Jumlah kendaraan dinas yang terbayar PKB dan asuransi** 2. Masukan : **Jumlah Dana** 3. Hasil : **Tingkat Kepuasan Aparatur**	1. Output : **26 Unit** 2. Masukan : **Rp. 105.540.000** 3. Hasil : **70 Skor**

Lampiran 3
Rewiew Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Triwulan Tahun 2019

OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG							
1.	**BELANJA GAJI PEGAWAI**		**OUTCOME :** **Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai**	**Rp. 1.114.097.000**	**Rp. 2.228.194.000**	**Rp. 3.342.291.000**	**Rp. 4.456.388.000**
	1.	Gaji Pegawai	OUTPUT : Jumlah Gaji	Rp. 1.114.097.000	Rp. 2.228.194.000	Rp. 3.342.291.000	Rp. 4.456.388.000
II. BELANJA LANGSUNG							
1.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**OUTCOME :** **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Rp. 521.111.680**	**Rp. 690.369.540**	**Rp. 322.208.920**	**Rp. 324.854.460**
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OUTPUT : Jumlah rekening telepon dan internet yang terbayarkan	Rp. 63.000.000	Rp. 35.500.000	Rp. 18.500.000	(Rp. 30.000.000)
	2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	OUTPUT : Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan kegiatan	Rp. 113.743.500	Rp. 151.658.000	Rp. 75.829.000	(Rp. 29.085.500)
	3.	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	OUTPUT : Jumlah jenis alat kebersihan dan bahan pembersih	Rp. 7.500.000	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 2.500.000
	4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	OUTPUT : Jenis alat tulis kantor	Rp. 30.705.000	Rp. 40.940.000	Rp. 20.470.000	Rp. 10.235.000
	5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	OUTPUT : Jenis kebutuhan barang cetak dan	Rp. 22.514.880	Rp. 30.019.840	Rp. 15.009.920	Rp. 7.504.960

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			penggandaan				
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	OUTPUT : Jumlah bahan bacaan	Rp. 5.100.000	Rp. 6.800.000	Rp. 3.400.000	Rp. 1.700.000
	7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	OUTPUT : Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	Rp. 61.200.000	Rp. 81.600.000	Rp. 40.800.000	Rp. 400.000
	8.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	OUTPUT : Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Rp. 160.800.000	Rp. 214.400.000	Rp. 107.200.000	Rp. 325.600.000
	9.	Penyediaan Jasa Perkantoran	OUTPUT : Jumlah tenaga kontrak dan THL yang terbayar	Rp. 54.000.000	Rp. 72.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	10.	Pengelolaan dan Managemen Arsip	OUTPUT : Tingkat kepuasan aparatur internal	Rp. 2.548.300	Rp. 47.451.700	Rp. -	Rp. -
2.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**OUTCOME :**	Rp. 223.965.000	Rp. 554.325.000	Rp. 141.525.000	Rp. 308.225.000
	1.	Pengadaan Peralatan Kantor	OUTPUT : Jenis alat kantor	Rp. -	Rp. 412.800.000	Rp. -	Rp. 119.700.000
	2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	OUTPUT : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 52.000.000
	3.	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	OUTPUT : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Rp. 109.250.000	Rp. 109.250.000	Rp. 109.250.000	Rp. 104.250.000
	4.	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor	OUTPUT : Jumlah alat kantor yang terpelihara	Rp. 41.875.000	Rp. 21.375.000	Rp. 21.375.000	Rp. 21.375.000
	5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	OUTPUT : Jumlah kendaraan yang terbayar PKB dan asuransi	Rp. 72.840.000	Rp. 10.900.000	Rp. 10.900.000	Rp. 10.900.000
3.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**		**OUTCOME :**	**Rp. 82.000.000**	**Rp. 371.000.000**	**Rp. 23.000.000**	**(Rp.16.000.000,00)**

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik				
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	OUTPUT : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Rp. 27.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 18.000.000	Rp. 9.000.000
	2.	Bimtek Perencanaan	OUTPUT : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Rp. 55.000.000	Rp. 335.000.000	Rp. 5.000.000	(Rp. 25.000.000)
4.	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**		**OUTCOME :** **Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Kinerja**	**Rp. 150.441.800**	**Rp. 49.721.700**	**Rp. 20.836.500**	**(Rp. 26.000.000)**
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OUTPUT : Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja	Rp. 150.441.800	Rp. 49.721.700	Rp. 20.836.500	(Rp. 26.000.000)
5.	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**OUTCOME :** **Persentase Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Perundang-Undangan**	**Rp. 2.338.432.200**	**Rp. 414.631.300**	**Rp. 205.038.700**	**(Rp. 187.904.500)**
	1.	Penetapan RPJMD	OUTPUT : Jumlah Perda RPJMD Tahun 2018-2023	Rp. 529.657.700	Rp. -	Rp. -	(Rp. 24.000.000)
	2.	Penyusunan Rancangan RKPD	OUTPUT : Dokumen RKPD Tahun 2019 & Prubahan RKPD Tahu 2018	Rp. 162.700.000	Rp. 127.000.000	Rp. 500.000	(Rp. 83.560.000)
	3.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	OUTPUT : Dokumen musrenbang RKPD	Rp. 670.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	OUTPUT : Jumlah Laporan Hasil Monev	Rp. 59.682.500	Rp. 54.050.000	Rp. 44.467.000	Rp. 12.800.500
	5.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	OUTPUT : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	Rp. 37.847.000	Rp. 85.753.000	Rp. 27.725.000	(Rp. 6.925.000)

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6.	Penyusunan KUA-PPAS beserta dan KUA-P dan PPAS-P	OUTPUT : Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPASP Tahun 2019	Rp. -	Rp. 125.803.300	Rp. 69.196.700	(Rp. 20.000.000)
	7.	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	OUTPUT : Jumlah dokumen hasil pendataan	Rp. 8.545.000	Rp. 22.025.000	Rp. 63.150.000	(Rp. 33.720.000)
	8.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	OUTPUT : Jumlah Buku LKPJ	Rp. 415.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -
	9.	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana	OUTPUT : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Rp. 455.000.000	Rp. -	Rp. -	(Rp. 32.500.000)
6.	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**		**<u>OUTCOME :</u>** **Persentase dokumen perencanaan pada lingup bidang yang baik**	**Rp. 358.882.700**	**Rp. 356.465.700**	**Rp. 295.019.000**	**Rp. 215.593.200**
	1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Pertanian	OUTPUT : Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian	Rp. 45.610.700	Rp. 38.480.700	Rp. 54.584.000	Rp. -
	2.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Usaha Mikro	OUTPUT :	Rp. 104.220.000	Rp. 94.830.000	Rp. 65.410.000	Rp. 186.735.000
	3.	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawasan Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek dan Kraton Kabupaten Pasuruan	OUTPUT : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawasan Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek dan Kraton Kabupaten Pasuruan	Rp. 87.459.000	Rp. 88.100.000	Rp. 66.650.000	Rp. -
	4.	Koordinasi perencanaan pembangunan subbidang kepariwisataanpenanaman modal dan ketenagakerjaan	OUTPUT : Jumlah dokumen perencanaan pada sektoral lingkup Sub Bidang Kepariwisataan, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang Sesuai Ketentuan	Rp. 43.302.200	Rp. 38.355.000	Rp. 41.635.000	Rp. 28.858.200

Uraian Program/kegiatan			Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
				Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5.	Penyusunan Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal di Kabupaten Pasuruan	OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan Rencana Aksi Pemberdayaan Tenaga Kerja Informal	Rp. 78.290.800	Rp. 96.700.000	Rp. 66.740.000	Rp. -
7.	**PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA**		**OUTCOME :** **Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya yang mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik**	**Rp. 212.979.350**	**Rp. 563.717.750**	**Rp. 277.037.900**	**Rp. 319.765.000**
	1.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	OUTPUT : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Rp. 63.745.000	Rp. 74.150.000	Rp. 128.355.000	Rp. 178.250.000
	2.	Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	OUTPUT : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Forum Kabupaten Sehat	Rp. 42.105.000	Rp. 44.325.000	Rp. 68.295.000	Rp. 38.275.000
	3.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	OUTPUT : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat yang sesuai ketentuan	Rp. 16.813.600	Rp. 196.381.500	Rp. 13.804.900	Rp. -
	4.	Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	OUTPUT : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Rp. 58.250.000	Rp. 49.224.000	Rp. 42.576.000	Rp. 93.950.000
	5.	Monitoring Evaluasi dan Pengedalian Bidang Sosial Budaya	OUTPUT : Jumlah Laporan hasil Monev dan Pengendalian bidang Sosbud	Rp. 23.521.750	Rp. 97.796.750	Rp. 20.781.500	Rp. 7.900.000
	6.	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Aparatur	OUTPUT : Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang sesuai ketentuan	Rp. 8.544.000	Rp. 101.840.500	Rp. 3.225.500	Rp. 1.390.000
8.	**PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER**		**OUTCOME :** **% OPD Lingkup Bidang Praswil yang**	**Rp. 163.760.875**	**Rp. 239.926.875**	**Rp. 115.401.875**	**Rp. 77.910.375**

Uraian Program/kegiatan		Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
			Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	DAYA ALAM	**mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik**				
	1. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Kab. Pasuruan	OUTPUT : Jumlah Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Perumahan dan Permukiman	Rp. 50.808.875	Rp. 131.207.875	Rp. 48.245.375	Rp. 19.737.875
	2. Koordinasi Peny. Kebijakan Pengembangan Praswil di Kab. Pas.	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi Sub bidang Prasarana Wilayah	Rp. 112.952.000	Rp. 108.719.000	Rp. 67.156.500	Rp. 58.172.500
9.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**OUTCOME :** **Persentase Peningkatan Penelitian dan Pengembangan**	**Rp. 1.048.401.400**	**Rp. 1.045.180.900**	**Rp. 213.484.600**	**Rp. 288.933.100**
	1. Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan	OUTPUT : Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan	Rp. 492.075.000	Rp. 388.225.000	Rp. 24.100.000	Rp. 221.125.000
	2. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	OUTPUT : Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan	Rp. 366.401.400	Rp. 338.610.900	Rp. 19.462.700	(Rp. 54.000.000)
	3. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pasuruan	OUTPUT : Jumlah Laporan Hasil FGD	Rp. 189.925.000	Rp. 318.345.000	Rp. 169.921.900	Rp. 121.808.100
10.	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**	**OUTCOME :** **Persentase Kesesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan**	**Rp. 119.165.500**	**Rp. 433.011.500**	**Rp. 246.876.000**	**Rp. 408.947.000**
	1. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	OUTPUT : Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan tata ruang wilayah	Rp. 39.168.000	Rp. 269.343.000	Rp. 35.871.500	Rp. 55.617.500
	2. Penyusunan SIG Peta Tematik dan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan	OUTPUT : Jumlah dokumen Peta Tematik dan Persetujuan Substansi Raperda Revisi RTRW	Rp. 79.997.500	Rp. 163.668.500	Rp. 211.004.500	Rp. 353.329.500

Uraian Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Anggran per-Triwulan)			
		Triw-1	Triw-2	Triw-3	Triw-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG		Rp. 1.575.520.000	Rp. 1.995.482.000	Rp. 651.924.000	Rp. 709.906.000
		Rp. 4.932.832.000,00			
TOTAL BELANJA LANGSUNG		Rp. 5.219.140.505	Rp. 4.718.350.265	Rp. 1.860.428.495	Rp. 1.714.323.635
		Rp. 13.512.242.900,00			
TOTAL BELANJA		Rp. 5.220.716.025	Rp. 6.713.832.265	Rp. 2.512.352.495	Rp. 2.424.229.635
		Rp. 18.445.074.900			

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN

Ir. IHWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630203 198903 1 015